



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR:100.3.3.2- 105 TAHUN 2025
TENTANG

DAFTAR DATA DAERAH YANG MENJADI DATA PRIORITAS DAERAH
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2030

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah Periode Tahun 2025 sampai dengan 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Petunjuk Pelaksanaan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 8/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Data Prioritas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 27);

- 27);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2025 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 411);

Memperhatikan: Berita Acara Kesepakatan Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor: 000.9.6/BA-Barenlitbangda-UP2/III/2025 tentang Penyepakatan Data Prioritas 2025 dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah periode tahun 2025 sampai dengan 2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan dalam mendukung Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Natuna.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Prov. Kepri di Tanjungpinang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Natuna di Ranai;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna di Ranai;
4. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna di Ranai;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna di Ranai;
6. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna di Ranai; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR:100.3.3.2- 105 TAHUN 2025
TENTANG DAFTAR DATA DAERAH YANG
MENJADI DATA PRIORITAS DAERAH PERIODE
TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2030

DAFTAR DATA KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
1.	Angka Kelulusan SD/MI	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
2.	Angka Kelulusan SMP/MTS	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	4.2.2.(a)	-
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	4.1.1.(d)	-
5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	4.1.1.(e)	-
6.	Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik (TK, SD, SMP)	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	4.c.1	-
7.	Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik TK	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	4.c.1	-
8.	Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik SD	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	4.c.1	-
9.	Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik SMP	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	4.c.1	-
10.	Persentase PAUD Berakreditasi Minimal B	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
11.	Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	4.1.1.(a)	-
12.	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
13.	Persentase Siswa dengan Nilai Kemampuan Literasi Pendidikan SD	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
14.	Persentase Siswa dengan Nilai Kemampuan Literasi Pendidikan SMP	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
15.	Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	4.1.1.(b)	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN / RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
16.	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	SPM	-
17.	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-SPM	-
18.	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-SPM	-
19.	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Disdikbud	Tahunan	Maret			SPM	
20.	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
21.	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
22.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
23.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Usia Dini	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
24.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
25.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
26.	Indeks Pendidikan(IKU)	Disdikbud	Tahunan	Maret				
27.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SD	Disdikbud	Tahunan	Maret				

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN / RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
28.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SMP	Disdikbud	Tahunan	Maret				
29.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD	Disdikbud	Tahunan	Maret				
30.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP	Disdikbud	Tahunan	Maret				
31.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 5-6 tahun	Disdikbud	Tahunan	Maret				
32.	Fasilitas Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
33.	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (Penyebarluasan, Pengkajian dan Penayaan Keberagaman)	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
34.	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi (Inventarisasi, Pengamanan Pemeliharaan dan Penyelamatan dan Publikasi)	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
35.	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan (Membangun Karakter Bangsa, Meningkatkan Ketahanan Budaya dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
36.	Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang Dibina (Peningkatan Kompetensi, Standarisasi dan Sertifikasi, serta Peningkatan KapasitasTata Kelola)	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
37.	Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
38.	Pemetaan SDM Cagar Budaya dan Pemuseuman	Disdikbud		Maret				
39.	Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Museum	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
40.	Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Museum Kabupaten/Kota	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
41.	Peningkatan Akses Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
42.	Peningkatan Kompetensi SDM Cagar Budaya dan Pemuseuman Kabupaten/Kota	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
43.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendaftaran Cagar Budaya dan Permuseuman	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
44.	Penyelenggaraan Kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
45.	Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan dan Penghapusan)	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
46.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
47.	Persentase Aktualisasi Budaya Daerah (IKU)	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	-	-
48.	Persentase benda, bangunan struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran)	Disdikbud	Tahunan	Maret				
49.	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	Disdikbud	Tahunan	Maret				
50.	Angka Kematian Bayi	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	3.2.2.(a)	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
51.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	3.1.1.	-
52.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
53.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
54.	Persentase Balita Gizi Buruk	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
55.	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
56.	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
57.	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
58.	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
59.	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan sesuai standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
60.	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
61.	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
62.	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
63.	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
64.	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
65.	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
66.	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
67.	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
68.	Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
69.	Persentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
70.	Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
71.	Persentase penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
72.	Persentase Prevalensi Stunting	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	2.2.1	-
73.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
74.	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
75.	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
76.	Persentase warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
77.	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
78.	Indeks Kesehatan (IKU)	Dinkes	Tahunan	Maret	-	-	-	-
79.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret				
80.	Prevelensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret				
81.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (treatment coverage)	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret				
82.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkolosis (treatment success rate)	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret				
83.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret				
84.	Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD T Akses Aman	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
85.	Kinerja Penyediaan Sambungan Rumah yang Tersambung ke IPALD	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
86.	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
87.	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kabupaten/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
88.	Jumlah Jaringan Informasi Sumber Daya air yang dibentuk	Dinas PUPR						
89.	Jumlah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-		6.3.1.(a)	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
90.	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
91.	Jumlah Penerima Manfaat Air Limbah	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
92.	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
93.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
94.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
95.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
96.	Kinerja Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
97.	Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Aman	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
98.	Kinerja Penyediaan Pelayanan SPALD S Akses Dasar	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
99.	Kinerja Penyediaan Prasarana Pengolahan Lumpur Tinja	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
100.	Kinerja Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
101.	Kinerja Penyediaan Unit Pengolahan Setempat	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
102.	Panjang Jalan Berdasarkan yang Ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
103.	Panjang Jalan yang Dibangun	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
104.	Panjang Jembatan yang Dibangun	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
105.	Penetapan Dokumen RISPAM Kabupaten/Kota (Ada/Tidak)	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
106.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Dinas PUPR						
107.	Persentase Bangunan Gedung sesuai dengan Peruntukan Ruang	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
108.	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
109.	Persentase Kemandapan Jalan	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
110.	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Primer Kondisi Baik	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
111.	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
112.	Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	6.2.1.(b)	-
113.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
114.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
115.	Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	6.1.1.(c)	-
116.	Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	6.2.1	-
117.	Proporsi Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	6.3.1.(b)	-
118.	Rasio Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana) yang Layak Fungsi	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
119.	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
120.	Tersedianya Data dan Informasi Pemenuhan komitmen permohonan IUJK Badan Usaha dan TDUP yang disetujui	Dinas PUPR	Tahunan	Maret				
121.	Tersedianya Data dan Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten/kota	Dinas PUPR	Tahunan	Maret				
122.	Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA Kabupaten/Kota (ada/tidak)	Dinas PUPR	Tahunan	Maret				
123.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
124.	Persentase Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dinas PUPR	Tahunan					
125.	Indeks Infrastruktur	Dinas PUPR	Tahunan	Maret				
126.	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Kabupaten	Dinas PUPR	Tahunan	Maret	-	-	-	-
127.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Dinas PUPR	Tahunan	Maret				
128.	Kapasitas air baku	Dinas PUPR	Tahunan	Maret				
129.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Dinas PUPR	Tahunan	Maret				
130.	Berkurangnya Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
131.	Jumlah kawasan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
132.	Jumlah kawasan Perumahan yang Terfasilitasi PSU	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
133.	Jumlah Rumah Pembangunan Baru/Peningkatan Kualitas	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
134.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
135.	Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
136.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
137.	Persentase Meningkatkan Rumah Layak Huni	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
138.	Rasio Rumah dan KK	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
139.	Dokumen Izin Membuka Tanah	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
140.	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
141.	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong di Kabupaten	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
142.	Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin Lokasi dibandingkan dengan Luas izin lokasi yang diterbitkan	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
143.	Persentase Penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
144.	SK Bupati/walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
145.	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
146.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
147.	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
148.	Rumah Tangga dengan Akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
149.	Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
150.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
151.	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
152.	Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
153.	Peningkatan Baku Mutu Air	D L H	Tahunan	Maret				
154.	Peningkatan Baku Mutu Udara	D L H	Tahunan	Maret				
155.	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
156.	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	D L H	Tahunan	Maret	-	-	11.6.1.(a)	-
157.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
158.	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
159.	Indeks Kualitas Air	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
160.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
161.	Indeks Kualitas Udara	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
162.	Pengolahan sampah (Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah)	D L H	Tahunan	Maret				
163.	Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah	D L H	Tahunan	Maret				

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESASAK
164.	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	D L H	Tahunan	Maret				
165.	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	D L H	Tahunan	Maret				
166.	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung sesuai Kebutuhan)	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
167.	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
168.	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
169.	Tersalurkannya Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
170.	Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
171.	Tersedianya Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
172.	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
173.	Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
174.	Tertanganinya Kerawanan Pangan	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
175.	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
176.	Persentase lahan pertanian yang dikendalikan/ditanggulangi	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
177.	Persentase penurunan angka penyakit ternak	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
178.	Persentase Prasarana yang Digunakan	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
179.	Prasarana Pertanian yang Digunakan	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
180.	Produksi Sektor Pertanian	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
181.	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
182.	Sarana Pertanian yang Diberikan	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
183.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
184.	Indeks Profesionalitas ASN	BKPSDM	Tahunan	Maret	-	-	-	-
185.	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga kesehatan)	BKPSDM	Tahunan	Maret	-	-	-	-
186.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	BKPSDM	Tahunan	Maret	-	-	-	-
187.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga kesehatan)	BKPSDM	Tahunan	Maret	-	-	-	-
188.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Dishub						
189.	Penetapan Tarif Angkutan Orang Antar Kota dalam Kabupaten, serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Kelas Ekonomi	Dishub	Tahunan	Februari	-	-	-	-
190.	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten atau Kota	Dishub	Tahunan	Februari	-	-	-	-
191.	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Dishub	Tahunan	Februari	-	-	-	-
192.	Terlaksananya Pelayanan Uji Berkala	Dishub						
193.	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan	Dishub	Tahunan	Februari	-	-	-	-
194.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
195.	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabuapten/Kota	Disnakertrans	Tahunan	Maret				
196.	Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Disnakertrans	Tahunan	Maret				

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
197.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Wilayah Kabupaten/Kota	Disnakertra ns	Tahunan	Maret	-	-	-	-
198.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Disnakertra ns	Tahunan	Maret				
199.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Disnakertra ns	Tahunan	Maret				
200.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Terdata	Disnakertra ns	Tahunan	Maret				
201.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota	Disnakertra ns	Tahunan	Maret				
202.	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	Disnakertra ns	Tahunan	Maret	-	-	-	-
203.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Disnakertra ns	Tahunan	Maret	-	-	-	-
204.	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kabupaten/Kota	Disnakertra ns	Tahunan	Maret	-	-	-	-
205.	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Disnakertra ns	Tahunan	Maret	-	-	-	-
206.	Jumlah Penganggur yang Dilatih	Disnakertra ns	Tahunan	Maret	-	-	-	-
207.	Jumlah Perjanjian Kerja yang Disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	Disnakertra ns	Tahunan	Maret	-	-	-	-
208.	Jumlah Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (Satu) Perusahaan	Disnakertra ns	Tahunan	Maret	-	-	-	-
209.	Jumlah Perselisihan Kepentingan	Disnakertra ns	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
210.	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	Disnakertra ns	Tahunan	Maret	-	-	-	-
211.	Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi	Disnakertra ns	Tahunan	Maret	-	-	-	-
212.	Persentase Jumlah Perusahaan yang Berselisih	Disnakertra ns	Tahunan	Maret	-	-	-	-
213.	Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	Disnakertra ns	Tahunan	Maret	-	-	-	-
214.	Persentase LPK yang Terakreditasi	Disnakertra ns	Tahunan	Maret	-	-	-	-
215.	Persentase Penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Disnakertra ns						
216.	Persentase Penyerapan Lulusan	Disnakertra ns	Tahunan	Maret	-	-	-	-
217.	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Disnakertra ns	Tahunan	Maret	-	-	-	-
218.	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Tendaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Disnakertra ns	Tahunan	Maret				
219.	Persentase Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur Skala Upah	Disnakertra ns	Tahunan	Maret	-	-	-	-
220.	Persentase Perusahaan yang Telah Memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Disnakertra ns	Tahunan	Maret	-	-	-	-
221.	Persentase Perusahaan yang Telah Tendaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Disnakertra ns	Tahunan	Maret	-	-	-	-
222.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Disnakertra ns	Tahunan	Maret	-	-	-	-
223.	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Parwisata yang Disertifikasi	Disnakertra ns	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
224.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
225.	Rasio Jumlah Instruktur Terhadap Peserta Pelatihan	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
226.	Rasio Penduduk yang Bekerja	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
227.	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
228.	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunannya	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
229.	Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
230.	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
231.	Persentase penyandang disabilitas bekerja disektor formal	Disnakertrans	Tahunan	Maret	-	-	-	-
232.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IKU)	D P K	Tahunan	Maret	-	-	-	-
233.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	D P K	Tahunan	Maret	-	-	-	-
234.	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	D P K	Tahunan	Maret	-	-	-	-
235.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai Bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	D P K	Tahunan	Maret	-	-	-	-
236.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	D P K	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
237.	Jumlah Bimbingan Sosial yang Dilaksanakan Kepada Keluarga dan Masyarakat	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
238.	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang untuk Masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
239.	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang Dimiliki	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
240.	Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Makanan	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
241.	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Paket Sandang	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
242.	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang Dimiliki	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
243.	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Tersedia	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
244.	Jumlah Pekerja Sosial Profesional dan/atau TKS dan/atau Relawan Sosial yang Disediakan	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
245.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
246.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dijangkau	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
247.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Direunifikasi dengan Keluarga	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
248.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Dirujuk	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
249.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Memanfaatkan Alat Bantu	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
250.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
251.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
252.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
253.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Perumahan sesuai Standar Gizi	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
254.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Sandang didalam panti	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
255.	Jumlah Rumah Singgah/Shelter/ Tempat Tinggal Sementara yang Dimiliki sesuai Standar	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
256.	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Disediakan di Rumah Singgah	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
257.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang Dibentuk	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
258.	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
259.	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
260.	Persentase Pemberdayaan Sosial	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
261.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
262.	Persentase Penyandang Disabilitas yang Miskin dan Rentan yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	1.3.1.(c)	-
263.	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
264.	Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
265.	Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
266.	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
267.	Persentase warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
268.	Kegiatan Pameran Penanaman Modal	DPMPTSP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
269.	Kenaikan Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	DPMPTSP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
270.	Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMPTSP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
271.	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	DPMPTSP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
272.	Laporan Realisasi Penanaman Modal	DPMPTSP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
273.	Pembinaan Aparatur Penanaman Modal Tingkat Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
274.	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	DPMPTSP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
275.	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMPTSP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
276.	PERDA Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
277.	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
278.	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal	DPMPTSP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
279.	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
280.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (IKU)	DPMPTSP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
281.	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
282.	Jumlah Event Luar Negeri yang Diikuti Provinsi	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
283.	Jumlah Industri Pariwisata Daerah yang Berpartisipasi pada Event Promosi Pariwisata di Dalam Negeri	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAS
284.	Jumlah Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
285.	Jumlah Kunjungan Wisata	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	8.9.1.(b)	-
286.	Jumlah Lokasi yang Diperoleh Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemitraan Usaha Masyarakat	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
287.	Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di Dalam Negeri	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
288.	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata per Sub Jenis Usaha di Kabupaten/Kota	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
289.	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	8.9.1.(a)	-
290.	Jumlah tamu wisatawan mancanegara	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
291.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
292.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
293.	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
294.	Persentase Produk Wisata yang Dipasarkan	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
295.	Persentase SDM Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisata	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
296.	Rata-rata Lama Tinggal Wisata	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
297.	Tingkat Hunian Akomodasi	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
298.	LPE Sektor Pariwisata dalam PDRB (IKU)	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
299.	Persentase Kawasan Pariwisata yang Dikembangkan (IKU)	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
300.	Jumlah Patroli Siaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosialisasi per Hari	Satpol PP	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
301.	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kabupaten/Kota yang Ditangani	Satpol PP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
302.	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satpol PP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
303.	Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Satpol PP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
304.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas sebagai PPNS	Satpol PP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
305.	Jumlah Sarana Prasarana Minimal Satpol PP	Satpol PP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
306.	Jumlah Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan	Satpol PP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
307.	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Satpol PP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
308.	Persentase Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Ikut Pelatihan	Satpol PP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
309.	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP	Satpol PP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
310.	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan	Satpol PP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
311.	Persentase Warga Negara yang Ikut Pelatihan	Satpol PP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
312.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Satpol PP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
313.	Tersedianya Aparatur Selama 24 (Jam) yang Dilaksanakan Secara Bergantian (Shift) di Kantor Kecamatan	Satpol PP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
314.	Tersedianya Sarana Prasarana Minimal	Satpol PP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
315.	Tersedianya SOP dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan Gangguan Trantibum	Satpol PP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
316.	Persentase Potensi Konflik terselesaikan	SatpolPP	Tahunan	Maret				

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
317.	Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Tingkat Nasional dan Daerah	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
318.	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam Sebagaimana Dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
319.	Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
320.	Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
321.	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
322.	Jumlah Relawan Kebakaran Dibawah Binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
323.	Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran yang Diadakan	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
324.	Persentase Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Penanganan Kebakaran	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
325.	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status KLB	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
326.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
327.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
328.	Pos Damkar yang Dilengkapi dengan Sarana/Prasarana Damkar, Sarana Prasarana Penyelamatan dan Evakuasi di Setiap Kelurahan/Desa	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
329.	Tersedianya Pos Sektor Damkar yang Dilengkapi Sarana Prasarana Damkar Sarana Prasarana Penyelamatan di Kantor Kecamatan	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
330.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
331.	Jumlah Daerah Bencana Alam/Bencana Sosial yang Mendapat Pendidikan Layanan Khusus (SMAB = Sekolah/Madrasah Aman Bencana)	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
332.	Persentase Jumlah Korban Berhasil Dicari, Ditolong dan Dievakuasi Terhadap Kejadian Bencana	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
333.	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
334.	Persentase Jumlah Petugas yang Aktif dalam Penanganan Darurat Bencana	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
335.	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status Darurat Bencana	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
336.	Persentase Penyelesaian Dokumen KRB sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
337.	Persentase Penyelesaian Dokumen Renkon sampai Dinyatakan Sah/Legal	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
338.	Persentase Penyelesaian Dokumen RPB sampai Dinyatakan Sah/Legal	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
339.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
340.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
341.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
342.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
343.	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan PUSDALOPS Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
344.	Persentase Warga Negara yang Mendapat Peralatan Perlindungan	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
345.	Indeks Risiko Bencana (IRBi)	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
346.	Jumlah Kader Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang sudah Dilatih	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
347.	Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO pada Perangkat Daerah yang sudah Dievaluasi	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
348.	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapat Pelatihan	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
349.	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Bantuan Keuangan, Fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten (APBD kabupaten)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
350.	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang telah Memiliki Standar Pelayanan Minimal	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
351.	Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Pelatihan	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
352.	Jumlah Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah Dilatih PUG	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
353.	Jumlah Media Massa (Cetak dan Elektronik) yang Bekerja Sama dengan Kabupaten/Kota (Dinas PPPA) untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
354.	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
355.	Jumlah Program PUG Ada Perangkat Daerah yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender di Tingkat Kabupaten/Kota	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
356.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
357.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
358.	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
359.	Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
360.	Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
361.	Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
362.	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
363.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
364.	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	5.5.1	-	-
365.	Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain selain Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
366.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
367.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
368.	Indeks Pembangunan Keluarga	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
369.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
370.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
371.	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
372.	Jumlah Stakeholders/Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja (Termasuk Organisasi Kemasyarakatan) yang Berperan serta Aktif dalam Pengelolaan Program KKBPK	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
373.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 Tahun	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
374.	Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
375.	Pengetahuan dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Metode Kontrasepsi Modern	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
376.	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang Siap Melayani KB MKJP	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
377.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
378.	Persentase Kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan Kesertaan Rendah	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
379.	Persentase Kesertaan KB Keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
380.	Persentase Masyarakat yang Terpapar Isi Pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
381.	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
382.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
383.	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
384.	Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
385.	TFR (Angka Kelahiran Total)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
386.	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
387.	Indeks Pembangunan Gender (IKU)	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
388.	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESASAK
389.	Meningkatnya Berkualitas Koperasi yang	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
390.	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi wirausaha	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
391.	Persentase Fasilitas Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
392.	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
393.	Persentase Fasilitas Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
394.	Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
395.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
396.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
397.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
398.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Pendampingan Melalui Lembaga Pendampingan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
399.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diinput kedalam Sistem Online Data System (ODS)	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
400.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Kemitraan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
401.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pembiayaan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
402.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pembiayaan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
403.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
404.	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
405.	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
406.	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
407.	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
	Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota							
408.	Persentase yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
409.	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
410.	Rasio Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
411.	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang Tersalurkan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
412.	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun Berjalan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
413.	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
414.	Persentase Gudang yang Tidak Mempunyai TDG	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
415.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
416.	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
417.	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
418.	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
419.	Persentase Pemeriksaan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
420.	Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
421.	Persentase Penerbitan TDG	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
422.	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
423.	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
424.	Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Pusat Perbelanjaan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
425.	Persentase Perizinan yang Diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Toko Swalayan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
426.	Persentase Produk yang di Pasarkan Melalui Pasar Digital	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
427.	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang Masuk dalam SII Nas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
428.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
429.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
430.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
431.	Persentase Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang Diterbitkan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
432.	Persentase Jumlah Izin yang Diterbitkan Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang Diterbitkan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
433.	Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
434.	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
435.	Persentase Pertambahan Industri Rumah Tangga dan Olahan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
436.	Persentase Tereaksainnya Dokumen RIPIK sampai dengan Ditetapkannya Menjadi PERDA	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
437.	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di kab/kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
438.	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
439.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level kabupaten/kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
440.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level kabupaten/kota	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
441.	Rasio Kewirausahaan Daerah	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
442.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
443.	Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
444.	Persentase Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
445.	Jumlah Desa Mandiri	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	10.1.1.(d)	-
446.	Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
447.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan Diberdayakan	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
448.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberikan Diklat	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
449.	Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
450.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
451.	Kota dan Desa maju Inklusif dan Berkelanjutan	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
452.	Persentase Desa Mandiri	DPMD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
453.	Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
454.	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
455.	Indeks Pengelolaan Aset	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
456.	Indeks Pengelolaan Keuangan	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
457.	Manajemen Aset	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
458.	Opini Laporan Keuangan	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
459.	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
460.	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
461.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
462.	Rasio PAD	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
463.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
464.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
465.	Maturitas SPIP	Inspektorat	Tahunan	Maret	-	-	-	-
466.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Inspektorat	Tahunan	Maret	-	-	-	-
467.	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Inspektorat	Tahunan	Maret	-	-	-	-
468.	Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
469.	Kepemilikan akta kelahiran	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	1.4.1.(j)	-
470.	Penerbitan Akta Kematian	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
471.	Penerbitan Akta Perceraian	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
472.	Penerbitan Akta Perkawinan	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
473.	Penyajian Data Kependudukan	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
474.	Perekaman KTP Elektronik	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
475.	Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) hari yang Memiliki KIA Kepemilikan Akta Kelahiran	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
476.	Persentase ASN Pengelola TIK yang Tersertifikasi Kompetensi di Bawah Pengelolaan Dinas Kominfo	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
477.	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Terupdate	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
478.	Persentase Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
479.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
480.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
481.	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
482.	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Portal dan Situs Web yang sesuai Standar	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
483.	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas yang Disediakan Dinas Kominfo	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
484.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
485.	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang Diamankan yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
486.	Persentase Sistem Elektronik yang Teraftar sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
487.	Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi E-Government	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
488.	Tersedianya Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang Disediakan Dinas Kominfo (Berbasis Suara, Video, Teks, Data dan Sinyal Lainnya) dengan Memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
489.	Jumlah Survey Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi dari BPS	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
490.	Tersedianya Buku Profil Daerah	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
491.	Persentase Informasi Publik yang disebarluaskan	Diskominfo						
492.	Persentase penduduk berusia 5 tahun keatas yang mengakses internet	Diskominfo	Tahunan	Maret				
493.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Diskominfo	Tahunan	Maret				
494.	Jumlah Penyelenggaraan Event/ Prestasi Tingkat Daerah	Dispora	Tahunan	Maret	-	-	-	-
495.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Dispora	Tahunan	Maret	-	-	-	-
496.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Dispora	Tahunan	Maret	-	-	-	-
497.	Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau yang di Produksi	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
498.	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Diterbitkan	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
499.	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan (Pendidikan dan Pelatihan/Penyuluhan dan Pendampingan/Kemitraan Usaha/ Kemudahan Akses Iptek dan	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
	Informasi/dan Penguatan Kelembagaan)							
500.	Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
501.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (SumberData: One Data KKP)	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
502.	Produksi Sektor Perikanan	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
503.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Setda	Tahunan	Maret	-	-	-	-
504.	Indeks Pengadaan Barang/Jasa	Setda	Tahunan	Maret	-	-	-	-
505.	Nilai LAKIP	Setda	Tahunan	Maret	-	-	-	-
506.	Nilai LPPD	Setda	Tahunan	Maret	-	-	-	-
507.	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	Setda	Tahunan	Maret	-	-	-	-
508.	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Setda	Tahunan	Maret	-	-	-	-
509.	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Setda	Tahunan	Maret	-	-	-	-
510.	Persentase Rumah Ibadah/Madrasah yang aktif (IKU)	Setda	Tahunan	Maret	-	-	-	-
511.	Indeks Reformasi Birokrasi (IKU)	Setda						
512.	Return on Asset (ROA) BUMD	Setda	Tahunan	Maret				
513.	Indeks Reformasi Hukum	Setda	Tahunan	Maret				
514.	Indeks Pelayanan Publik	Setda	Tahunan	Maret				
515.	Konsumsi listrik per kapita	Setda	Tahunan	Maret				
516.	Indek Kualitas Perencanaan	BP3D	Tahunan	Maret	-	-	-	-
517.	Persentase Indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target	BP3D	Tahunan	Maret	-	-	17.18.1.(d)	-
518.	Indeks daya Saing Daerah (IDSD)	BP3D						
519.	Indeks Inovasi Daerah	BP3D						
520.	Indeks Pengeluaran	BP3D						
521.	Indeks Kapabilitas Inovasi daerah	Bappeda	Tahunan	Maret				
522.	Jumlah LSM, Ormas dan OKP	Bakesbangpol	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN / RKP	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
523.	Jumlah peserta sosialisasi wasbang	Bakesbang pol	Tahunan	Maret	-	-	-	-
524.	Jumlah Sosialisasi/Rapat/Monitoring	Bakesbang pol	Tahunan	Maret	-	-	-	-
525.	Pembinaan Partai Politik	Bakesbang pol	Tahunan	Maret	-	-	-	-
526.	Tercapainya Sinergitas Dinas/Instansi dalam Menangani Konflik Sosial	Bakesbang pol	Tahunan	Maret	-	-	-	-
527.	Persentase Angka Kriminalitas (IKU)	Bakesbang pol	Tahunan	Maret				
528.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Bakesbang pol	Tahunan	Maret				
529.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum -Pilpres -Pileg -Pemilukada	Bakesbang pol	Tahunan	Maret				



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
 NOMOR:100.3.3.2- 105 TAHUN 2025
 TENTANG DAFTAR DATA DAERAH YANG
 MENJADI DATA PRIORITAS DAERAH PERIODE
 TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2030

DATA PRIORITAS KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP/ RPJPD	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
1.	Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik (TK, SD, SMP)	Disdikbud	Tahunan	Maret	-	-	4.c.1	-
2.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SD	Disdikbud	Tahunan	Maret				
3.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SMP	Disdikbud	Tahunan	Maret				
4.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD	Disdikbud	Tahunan	Maret				
5.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP	Disdikbud	Tahunan	Maret				
6.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 5-6 tahun	Disdikbud	Tahunan	Maret				
7.	Persentase benda, bangunan struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran)	Disdikbud	Tahunan	Maret				

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP/ RPJPD	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
8.	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	Disdikbud	Tahunan	Maret				
9.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret				
10.	Prevelensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret				
11.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (treatment coverage)(%)	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret				
12.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkolosis (treatment success rate)	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret				
13.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Dinas Kesehatan	Tahunan	Maret				
14.	Persentase Pembangunan Kawasan Perbatasan	BPP	Tahunan					
15.	Indeks Infrastruktur	Dinas PUPR	Tahunan	Maret				
16.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Dinas PUPR	Tahunan	Maret				
17.	Kapasitas air baku (m3/detik)	Dinas PUPR	Tahunan	Maret				
18.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Dinas PUPR	Tahunan	Maret				
19.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani	Dinas Perkim	Tahunan	Maret	-	-	-	-
20.	Rumah Tangga dengan Akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Dinas Perkim	Tahunan	Maret				
21.	Indeks Kualitas Air	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
22.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
23.	Indeks Kualitas Udara	D L H	Tahunan	Maret	-	-	-	-
24.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	DLH						

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP/ RPJPD	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
25.	Pengolahan sampah (Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah) (%)	D L H	Tahunan	Maret				
26.	Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)	D L H	Tahunan	Maret				
27.	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	D L H	Tahunan	Maret				
28.	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	D L H	Tahunan	Maret				
29.	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung sesuai Kebutuhan)	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
30.	Produksi Sektor Pertanian	DKPP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
31.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	DKPP	Tahunan	Maret				
32.	Indeks Profesionalitas ASN	BKPSDM	Tahunan	Maret	-	-	-	-
33.	Rasio Konektivitas							
34.	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Disnakertrans	Tahunan	Maret				
35.	Persentase penyandang disabilitas bekerja disektor formal	Disnakertrans	Tahunan	Maret				
36.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	D P K	Tahunan	Maret	-	-	-	-
37.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS	Dinsos	Tahunan	Maret	-	-	-	-
38.	Kenaikan Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	DPMPTSP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
39.	Jumlah Kunjungan Wisata	Dispar	Tahunan	Maret	-	-	8.9.1.(b)	-
40.	Jumlah tamu wisatawan mancanegara	Dispar	Tahunan	Maret				
41.	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Satpol PP	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP/ RPJPD	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
42.	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan	Satpol PP	Tahunan	Maret	-	-	-	-
43.	Persentase Potensi Konflik terselesaikan	Satpol PP	Tahunan	Maret				
44.	Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran yang Diadakan	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
45.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Damkar	Tahunan	Maret	-	-	-	-
46.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
47.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
48.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
49.	Indeks Risiko Bencana (IRBi)	BPBD	Tahunan	Maret				
50.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
51.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TTPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	DP3AP2KB	Tahunan	Maret	-	-	-	-
52.	Indeks Pembangunan Keluarga	DP3AP2KB	Tahunan	Maret				
53.	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
54.	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-
55.	Persentase Pertambahan Industri Rumah Tangga dan Olahan	Disperindag kum	Tahunan	Maret	-	-	-	-

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP/ RPJPD	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
56.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level kabupaten/kota (%)	Disperindag kum	Tahunan	Maret				
57.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level kabupaten/kota (%)	Disperindag kum	Tahunan	Maret				
58.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Disperindag kum	Tahunan	Maret				
59.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	Disperindag kum	Tahunan	Maret				
60.	Persentase Desa Mandiri (%)	DPMD	Tahunan	Maret				
61.	Indeks Pengelolaan Aset	BPKPD	Tahunan	Maret	-	-	-	-
62.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	BPKPD	Tahunan	Maret				
63.	Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) hari yang Memiliki KIA Kepemilikan Akta Kelahiran	Disdukcapil	Tahunan	Maret	-	-	-	-
64.	Persentase Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Diskominfo	Tahunan	Maret	-	-	-	-
65.	Persentase penduduk berusia 5 tahun keatas yang mengakses internet	Diskominfo	Tahunan	Maret				
66.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Diskominfo	Tahunan	Maret				
67.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Dispora	Tahunan	Maret	-	-	-	-
68.	Produksi Sektor Perikanan	Diskan	Tahunan	Maret	-	-	-	-
69.	Return on Asset (ROA) BUMD	Setda	Tahunan	Maret				
70.	Konsumsi listrik per kapita	Setda	Tahunan	Maret				
71.	Indeks Kualitas Perencanaan	Bappeda	Tahunan	Maret				
72.	Indeks Kapabilitas Inovasi daerah	Bappeda	Tahunan	Maret				

NO	NAMA DATA	PRODUSEN DATA	JADWAL PEMUTAKHIRAN	JADWAL RILIS	TAGGING RAD SPBE	TAGGING RPJMN/ RKP/ RPJPD	TAGGING TPB/SDGs	TAGGING KEBUTUHAN MENDESAK
73.	Persentase Angka Kriminalitas	Bakesbang pol	Tahunan	Maret				
74.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Bakesbang pol	Tahunan	Maret				

